



bencana kebakaran di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2012.

Tabel 2.47
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	1	1	N/A		
2	Jumlah Penduduk (jwan)	213.762	245.615	252.972		
3	Luas Wilayah Kab. Kutai Timur (ha)	3.429.260	3.429.260	3.429.260		
4	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	14	N/A	N/A		
5	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran terd. Luas Wilayah	0.000000291	0.000000291	N/A		
6	Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	N/A	N/A	N/A		

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Data diolah

E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planologi perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan kaserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 2.48
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
----	--------	------	------	------	------	------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Luas wilayah hiri HPL/HCB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Luas wilayah (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIMKEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tabel 2.48
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	874	1.081	1.565		
2.	Jumlah Bangunan	-	-	-		
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	-	-	-		

Sumber: Dinas PU Kabupaten Kutai Timur

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timur yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kutai Timur.

F. Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perencanaan Pembangunan, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2009-2013.



Tabel 2.50
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen Rencana Strategis SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Sarana Pengangkutan

Tabel 2.51
Data Angkutan Kota, AKDP dan Travel
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010

No	Jenis Angkutan	Jumlah Armada	Jumlah Penumpang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angkutan Kota	60	2.835
2	Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	82	5.110
3	Angkutan Travel	80	2.815
4	Jumlah	222	10.760

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Ijin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturuan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengemudi angkutan umum. Berikut adalah kondisi ijin trayek angkutan umum di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2008-2012.

2) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan (impor) di Kabupaten Kutai Timur baik yang dibuat dan/atau direkit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan



wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut adalah kondisi mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kin di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.52
Jumlah Uji Kin Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

No	Angkutan Umum	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Mobil penumpang umum	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mobil bus	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mobil barang	-	2.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIMFEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Dalam tahun 2008-2012 jumlah penumpang angkutan umum baik bus, kapal laut, maupun pesawat udara menunjukkan perkembangan naik turun.. Kondisi seperti nampak terjadi penurunan dari tahun 2007 berjumlah 522.232 orang menjadi 442.455 orang pada tahun 2008. Penurunan ini terjadi dimungkinkan karena terjadi kelesuan ekonomi akibat krisis yang melanda dunia Barat dan berdampak pada perekonomian makro Indonesia maupun di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.53
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penumpang Dar	-	-	5.110	-	-
2	Jumlah penumpang Kapal laut	411.216	426.237	472.121	-	-
3	Jumlah penumpang Pesawat udara	31.230	35.863	19.060	-	-
4	Total Jumlah Penumpang	442.455	457.120	496.291	-	-

Sumber: Simfeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Parkembangan penumpang setelah tahun 2008 hingga tahun 2010 terus mengalami kondisi pulih kembali. Situasi ini dapat kita lihat perkembangan penumpang dari tahun 2008 berjumlah mengalami lonjakan penumpang dari



442.455 penumpang menjadi 457.120 penumpang. Keadaan seperti ini berlanjut pada tahun 2010, juga mengalami lonjakan penumpang menjadi 490.291 penumpang. Lonjakan penumpang ini boleh jadi karena situasi perekonomian di Kabupaten Kutai Timur berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Tabel 2.54
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah pelabuhan udara	11	11	11	11	11
3	Jumlah terminal bis	-	-	-	-	-
4	Jumlah	13	13	13	13	13

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, darat dalam periode 2006-2010 mengalami peningkatan hanya satu, yakni karena penambahan pelabuhan laut pada tahun 2008, sehingga saat ini telah menjadi 13 pelabuhan/terminal. Sedangkan pelabuhan udara tidak mengalami perkembangan dalam periode tersebut. Perkembangan jumlah pelabuhan/terminal ini tidak lepas dari tingginya mobilitas penduduk dari dan ke Kabupaten Kutai Timur.

3) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Berikut adalah kondisi pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.55
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	-	-	-	-	-
2	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia	-	-	-	-	-
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

H. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Penanganan Sampah

Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2008-2012

Tabel 2.56
Volume Sampah yang Tertangani
di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah volume sampah yang tertangani (m³)	92	105	116	-	-
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m³)	116	119	128	-	-
3	Persentase (%)	79,31	88,25	90,06	-	-

Sumber: UPT Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 2012

2) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Berikut adalah kondisi TPSS di Ibukota Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2008 - 2012.

Tabel 2.57
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
di Ibukota Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah TPSS [Unit]	215	220	228	-	-



No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	137.5	185	225	-	-
3	Jumlah Penduduk (Jawa)	213.762	245.815	262.972	-	-
4	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk	0,00064	0,00075	0,00088	-	-

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

I. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari persentase lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kondisi administrasi pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012 sebagai berikut:

Tabel 2.58
Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas wilayah daratan	-	-	-	-	-
2	Luas tanah bersertifikat HGB	-	-	-	-	-
3	Luas tanah bersertifikat HGU	-	-	-	-	-
4	Luas tanah bersertifikat HM	-	-	-	-	-
5	Luas tanah bersertifikat HPL	-	-	-	-	-
6	Total luas tanah bersertifikat	-	-	-	-	-
7	Persentase HGB dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
8	Persentase HGU dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
9	Persentase HM dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
10	Persentase HPL dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
11	Persentase total luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PLTR dan BPN

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:



1) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Total jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 444.761 jiwa. Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur penduduk usia muda, produktif tua memberikan suatu gambaran sosial ekonomi bahwa menurut indikator demografi, Kabupaten Kutai Timur masih dapat berkembang dikarenakan kondisi struktur penduduknya sebagian besar merupakan penduduk yang masih mampu melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini adalah gambaran secara terperinci mengenai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Urutan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muda (0-14)	71.606	93.687	126.884	144.549	140.225
2	Produktif (15-64)	163.181	234.508	279.290	374.854	399.055
3	Tua (65+)	11.030	7.888	9.422	8.327	11.149
4	Jumlah	245.817	336.247	430.865	527.723	549.429

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.56 nampak komposisi penduduk Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh kelompok penduduk dewasa (15-64 tahun). Hingga tahun 2013 komposisi penduduk muda berjumlah 140.225 jiwa atau sekitar 25,52 persen, penduduk tua berjumlah 11.149 jiwa atau sekitar 2,03 persen. Sedangkan penduduk dewasa berjumlah 399.055 jiwa atau 72,45 persen.

2) Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Banyaknya jumlah penduduk yang dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat menggambarkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.60
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan
(Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Timur 2008-2012

No	Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laki-laki:					
	Tidak/Belum Punya	N/A	24.809	7.044	-	-



No	Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ijazah					
	SD/Setara SD	7.540	28.804	28.938	-	-
	SMP/Setara SMP	42.162	17.802	21.221	-	-
	SMA/Setara SMA	27.051	17.181	33.839	-	-
	Perguruan Tinggi	2.159	2.379	5.400	-	-
2.	Pemampuan:					
	Tidak/Belum Punya Ijazah	N/A	22.611	8.905	-	-
	SD/Setara SD	10.058	25.323	27.437	-	-
	SMP/Setara SMP	43.829	16.309	17.920	-	-
	SMA/Setara SMA	14.105	15.658	19.503	-	-
	Perguruan Tinggi	1.160	2.168	4.412	-	-
3.	Jumlah	148.165	174.211	175.588	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

3) Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah menjadi indikator tertib administrasi kependudukan. Berikut ini adalah gambaran tingkat kesadaran masyarakat Kutai Timur akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Gambaran tentang perkembangan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2.61
Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta lahir, Akta Nikah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Kepemilikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	• Sudah Memiliki	N/A	N/A	45.502	-	-
	• Belum Memiliki	N/A	N/A	322.136	-	-
2	Kartu Keluarga (KK)					
	• Sudah Memiliki	N/A	N/A	42.583	-	-
	• Belum Memiliki	N/A	N/A	94.031	-	-
3	Akta Kelahiran	7.363	7.527	10.973	-	-
4	Akta Nikah [Non Muslim]	370	416	851	-	-

Sumber: Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk dapat mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Di Kabupaten Kutai Timur 7,15 persen pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah 92,85 persen yang bekerja di lembaga swasta dari 37.161 pekerja perempuan.

2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai upaya perlindungan terhadap kaum wanita, kekerasan dalam rumah tangga telah dimasukkan sebagai tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Penetapan aturan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki kekuatan hukum pasti. Berikut ini adalah gambaran Rasio KDRT di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.62
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah KDRT	7	11	15	-	-
2	Jumlah Rumah Tangga	63.481	65.014	77.031	-	-
3	Rasio KDRT	0,00013	0,00017	0,00019	-	-

Sumber:

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011

L. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk



menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, perkembangan jumlah anak dan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2008-2012 dapat dijelaskan sebagaimana pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah anak	19.425	21.430	22.501	-	-
2	Jumlah keluarga	53.781	65.014	77.031	-	-
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,8	3,0	3,4	-	-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 (dolah)

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur sebesar 26.712. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kutai Timur sebanyak 2-3 anak. Untuk lebih jelasnya, jumlah akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2010 sebanyak 25.822 orang peserta dari total 42.365 PUS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel 2.64
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah PUS	25.097	-	42.365	-	-
2	Jumlah Akseptor KB	23.771	-	25.822	-	-
3	Rasio Akseptor KB	0,95	-	0,60	-	-

Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2012

M. Sosial

Masalah sosial adalah perilaku atau keadaan kompleks yang akibatnya berpengaruh kesejahteraan orang banyak (umum) serta dapat mengganggu kestabilan masyarakat, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,



pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Zastrow, 2000).

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat.

Perkembangan jumlah anak terlantar di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan jumlahnya tidak berubah pada tahun 2010 dan 2011 yakni 8.193 orang, sedangkan banyaknya komunitas adat terpencil mengalami peningkatan jumlah KK dari semula tahun 2008 sebesar 147 KK meningkat menjadi 167 pada tahun 2009 serta mengalami peningkatan lagi pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 425 KK.

Tabel 2.65
Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banyaknya komunitas adat terpencil (KK)	147	167	425	425	N/A
2	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun) (Orang)		-	8.193	8.193	N/A

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kalim Dalam Angka)

N. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan



tersebut. Untuk mengetahui rasio daya serap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	27.953	5.423	6.408	-	-
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	23	20	12	19	-
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:1.215	1:271	1:536	-	-

Sumber: RPMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2) Kesempatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlah penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis agribisnis. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008-2012

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2008		2009		2010		2011		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	48.612	52,46	43.736	52,46	51.310	46,45	60.470	51,80	62.029	52,84



Pertambangan	10.439	11,86	9.890	11,33	17.385	16,40	15.233	13,05	16.100	13,74
Industri Pengolahan	417	0,47	392	0,47	1.181	1,02	1.725	1,48	1.100	0,97
Listrik, Gas dan Air Bersih	381	0,43	375	0,45	257	0,24	-	-	-	-
Bangunan	2033	2,30	1.940	2,33	6.224	4,00	4.343	3,72	4.753	4,05
Pendidikan, Hotel dan Restoran	6.268	7,09	5.929	7,11	11.599	10,94	18.465	15,02	14.465	12,34
Pengangkutan dan Komunikasi	576	0,65	500	0,60	3.816	2,04	2.779	2,38	2.550	2,13
Kecamatan, Perdagangan dan Jasa Perusahaan	1.408	1,09	1.416	1,70	10.44	3,82	1.130	0,07	1.526	1,20
Jasa-jasa	13.994	13,804	13.160	15,65	13.176	12,44	12.507	10,79	14.475	12,33
Lainnya	8.481	7,31	8.104	7,32	0	0	-	-	-	-
Total	88.655	100,00	88.367	100,00	106.902	100,00	116.743	100,00	117.280	100,00

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurun jumlah kemiskinan dan menurun jumlah pengangguran. Untuk mengetahui jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.65 dibawah. Persentase koperasi aktif menunjukan kecenderungan relatif tetap dan tahun ke tahun berkisar sekitar 66 persen, dengan demikian perlu dilakukan pembinaan manajemen perkoperasian sehingga mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT menunjukan keseriusan nilai dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi.

Tabel 2.68
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012



No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah koperasi aktif	477	533	580		
2	Jumlah koperasi	726	796	804	806	806
3	Persentase koperasi aktif	66 %	67 %	66 %		-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur

2) Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Untuk mengetahui jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah seluruh UKM	2752	2945	3057	3.450	5.080
2	Jumlah BPR/LKM	1	1	3	46	46
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	0	0	0		-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur

3) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer*. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, memudahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil dapat mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Untuk mengetahui jumlah BPR/LKM



di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah BPR	1	1	1	1	1
2	Jumlah LKM	8	8	8	45	45
3	Jumlah BPR dan LKM	9	9	9	46	46

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

P. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Namun hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kutim kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.71 di bawah ini:

Tabel 2.71
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	Jumlah Investor				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PMDN	4	7	6	-	-
2	PMA	19	13	6	-	-
3	Total	23	20	12	15	21

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)



Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dapat mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Untuk mengetahui jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Jumlah Investasi PMDN/PMA Yang Disetujui
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	5	20.080.108,64	18	218.249,91
2009	7	1.832.672,35	13	5.182.072,62
2010	6	955.809,47	8	1.892.000,00
2011		1.250.094,26	13	134.704,60
2012*	-	42.382.200,00	-	3.300,00

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

*] Angka proyeksi

Perkembangan jumlah investasi di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2008 hingga 2010 mengalami pasang surut. Nilai investasi terendah dicapai pada



tahun 2007 yakni sebesar Rp 1,625 triliun. Angka ini sangat turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 18,20 triliun. Namun pada tahun berikut yakni 2008 mengalami lonjakan cukup tajam menjadi Rp 20,32 triliun. Dua tahun terakhir yakni 2011 dan 2012 nilai investasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan investasi PMDN yang sangat tajam dari sebelumnya yakni sebesar Rp 1,027 triliun, sedangkan PMA justru mengalami penurunan berturut-turut. Penurunan nilai investasi yang cukup tajam dalam dua tahun terakhir hendaknya perlu menjadi perhatian. Hal ini mengingat investasi cukup mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Untuk mengetahui rasio daya serap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	27.953	5.423	6.438	5.342	-
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	23	20	12	19	-
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:1.215	1:271	1:536	1:281	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat dari sejumlah indikator: *Pertama*, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni budaya. *Kedua*, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang dilestarikan. Untuk mengetahui gambaran umum kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.73. Apabila dikaitkan dengan peningkatan potensi pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus



berupaya menggali dan menginventarisir warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur. Selain itu diperlukan pula upaya untuk memasyarakatkan warisan budaya kepada seluruh masyarakat, terutama pada generasi muda agar mereka dapat membantu pelestarian budaya daerah tersebut.

Tabel 2.74
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	5	6	6	3
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	10	10	10	4	4
3	Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10%	50%	80%	100	100
4	Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,061 %	0,072%	0,074%		

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

G. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperduyaannya. Sedangkan banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda dan organisasi olahraga menggambarkan tingkat partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui gambaran umum organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Jumlah Organisasi dan Kegiatan
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,061	0,072	0,074		
2	Rasio lapangan olah raga per 1000 penduduk	0,087	0,102	0,114		



3	Jumlah organisasi dan Anggota Karang Taruna	135 buah	135 buah	135 buah		
4	Anggota KNPI (Urang)	150	150	200		

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011

R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari: *Pertama*, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dari sisi tugas dan rasio jumlahnya dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah. *Kedua*, keberadaan pos siskamling per desa/kelurahan yang dari sisi jumlahnya dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam turut serta memelihara ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungannya. Untuk mengetahui gambaran umum keberadaan Satpol PP, Linmas dan Pos Siskamling di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah. Gambaran umum keberadaan Satpol PP di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah polisi pamong praja	121	97	118	-	-
2	Jumlah penduduk	213.782	245.915	262.972	-	-
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1:2.116	1:2.534	1:2.267		

Sumber: Satuan Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2) Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk



Keberadaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Gambaran umum keberadaan Satuan Linmas di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Linmas	1.877	1.877	1.877	-	-
2	Jumlah Penduduk	213.762	245.015	262.972	-	-
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	114	130	140	-	-

Sumber: SIMBEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012. Inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya perlu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengimplementasikan *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.78
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



1	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	-	-	-
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	-	-	-	-	-
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	-	-	-	-	-
2	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	-	-	-	-	-
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	-	-	-	-	-
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	-	-	-	-	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012

2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penerima pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2), kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, (10) kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini mengingat masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan dapat



sebagai tolak ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakannya, dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan. Namun Survey IKM di Kabupaten Kutai Timur masih belum diselenggarakan, namun demikian IKM yang ditargetkan sebesar 90% dalam pencapaian pelayanan masyarakat.

T. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketahanan Pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.79
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	43.375	44.129	38.357	36.072	43.170
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	213.762	245.815	262.972	-	-
3	Jumlah Konsumsi Pangan Utama (ton)	24.155,11	31.614,52	34.975,28	-	-
4	Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama Terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	44,31	28,36	8,82	-	-

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama



kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.80
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

U. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.

Pemberdayaan perempuan terutama ditujukan pada peningkatan peran serta kaum wanita dalam proses pembangunan. Dewasa ini pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kutai Timur masih kurang. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan dilakukan dengan program PKK serta Keluarga Berencana.

Gender merupakan suatu bentuk atau konstruksi sosial atau interpretasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isu keadilan gender muncul sebagai akibat adanya perbedaan-perbedaan yang diciptakan atau dikonstruksikan oleh masyarakat. Gender menjadi masalah yang serius ketika ia menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan melakukan kontrol atas sumberdaya dan/atau memiliki akses atau kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

Indikator pro-gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPM) atau *Gender-related Development Indeks* (GDI) dan Ukuran Pemberdayaan Jender (UPJ) atau *Gender Empowerment Measure* (GEM). Indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG sama dengan IPM dengan memperhatikan perbedaan antara gender. UPJ menghitung persentase perempuan di parlemen, pejabat dan



manajer senior dalam bidang profesional dan teknis serta disparitas dalam pendapatan gender.

V. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Ketersediaan Dokumen Statistik

Ketersediaan dokumen statistik merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Susoda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.81
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√		√		√		√		√	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	√		√		√		√		√	
3	Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah (Susoda)										
4	KBDA										
5	Indeks Gini Rasio		√		√		√		√		√
6	Input Output	√		√		√		√		√	
7	Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM)										



8	Indeks Korelasi (IHK)								
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

W. Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Ansip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis penyolenggaraan pemerintahan.

2) Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu

Kearsipan, baik data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang profesional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangat penting.

X. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kuta Timur berperan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jaringan komunikasi yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jaringan telepon genggam	5	6	8	6	6
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	6	7	9	7	7

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur



2) Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional

Tabel 2.83
Jumlah Surat Kabar, Radio dan Televisi Nasional/Lokal
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	1	1	1	-	-
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	3	3	3	-	-
3	Total jenis surat kabar (1+2)	4	4	4	-	-
4	Jumlah penyiaran radio lokal	N/A	N/A	8	-	-
5	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	-	-
6	Jumlah penyiaran Televisi lokal	N/A	N/A	1	-	-
7	Jumlah penyiaran Televisi nasional	11	11	11	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Media informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam penyebaran berbagai informasi termasuk informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagai media informasi yang ada.

Y. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.84
Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	-	-	-	-	-
3	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
4	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-



5	Total Perpustakaan (1+3)	-	-	-	-
6	Total pengunjung Perpustakaan (2+4)				

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur (konfirmasi data)

Keheradaan perpustakaan harus dijunjung dengan pengelolaan manajemen secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunaanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca masyarakat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 urusan, yaitu:

A. Pertanian

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. **Sektor pertanian** memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur. Namun kontribusinya cenderung terus menurun seiring dengan meningkatnya peran sektor pertambangan dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu dari 4,79 persen pada tahun 2006 menjadi 4,37 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 perannya terus menurun yaitu hanya sebesar 3,78 persen. Namun demikian sektor pertanian diyakini dapat menyumbang terhadap pertumbuhan dan dapat membentuk struktur ekonomi seimbang dimasa mendatang (Rusastra, dkk 2004) apabila prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tetap berorientasi kepada pembangunan pertanian dalam arti luas. Potensi tersebut terlihat berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2009-2012, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi antara 29,17 persen - 29,38 persen, dimana subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian dengan *share* antara 5,36 persen - 10,68 persen

Tabel 2.85
Nilai PDRB, Paranan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap Total PDRB
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 dan 2010

No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Total PDRB (%)	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanaman Pangan Makassar	230.690,34	250.432,22	2,83	1,46	1,59	0,84
2	Perkebunan	363.787,91	420.183,16	10,29	9,02	0,44	1,35
3	Peternakan	102.698,87	100.517,73	0,94	3,36	0,34	0,38
4	Kehutanan	313.837,08	316.886,84	[0,29]	[9,06]	2,18	1,15
5	Perikanan	170.826,25	186.281,71	5,34	5,43	0,69	0,82
	PERTANIAN	1.186.838,44	1.292.751,66	2,44	2,26	5,23	4,34
	Total PDRB	27.380.004,89	34.179.685,99				

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011

1) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, dan Perkebunan

Berdasarkan perkembangan produktivitas padi, palawija, sayuran dan lain-lain selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tahun 2008 hingga 2011 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan produktivitas dari beberapa komoditi. Dari 9 (sembilan) komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan diantaranya padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, sayuran, buah-buahan dan palawija, sedangkan ubi kayu dan ubi jalar mengalami trend yang cukup positif mulai tahun 2008 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan produktivitas yang cukup konsisten seperti ditunjukkan Tabel 2.86.

Dalam mewujudkan target komandirian pangan di Kabupaten Kutai Timur pada akhir tahun 2015 maka diperlukan komitmen dan upaya-upaya terobosan dan inovasi terus menerus. Hal ini terlihat dari tingkat produktivitas beberapa komoditas yang masih mengalami pasang surut kecuali ubi kayu dan ubi jalar yang sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu berkomitmen untuk melaksanakan program-program pembangunan sektor pertanian dalam arti luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis agribisnis sesuai visi RPJMD Tahun 2011-2015.

Tabel 2.86
Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, dan Buah-buahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	Satuan	Tahun				
		Kw/Ha	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi sawah	Kw/Ha	39,57	37,13	41,19	41,17	-
2	Padi ladang	Kw/Ha	24,19	29,41	24,34	24,34	-
3	Jagung	Kw/Ha	19,98	20,79	20,80	20,78	-
4	Ubi kayu	Kw/Ha	128,58	131,38	139,62	139,67	-
5	Ubi jalar	Kw/Ha	79,51	84,17	90,51	90,58	-
6	Kacang tanah	Kw/Ha	10,25	10,06	10,18	10,10	-



7	Kedelai	Kw/Ha	10,21	9,69	11,01	11,60	-
8	Kacang hijau	Kw/Ha	10,52	10,20	10,72	10,30	-
9	Sayuran	Kw/Ha	5,08	5,86	5,10	6,54	-
10	Buah-buahan	Kw/Ha	14,06	15,56	23,33	24,06	-
11	Pelawija	Kw/Ha	45,06	38,52	41,93	46,20	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Berdasarkan kurun waktu 2008-2012 produktivitas komoditas pertanian memang cenderung naik turun kecuali ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami trend kenaikan. Demikian pula jika dilihat berdasarkan jumlah produksi tiap tahunnya juga menunjukkan naik turun tiap tahunnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan sektor pertanian telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam rangka mewujudkan swasembada pangan terutama pada komoditi padi. Pada tahun 2011 produksi padi mengalami peningkatan sebesar 4.272 ton yakni dari 29.349 ton pada tahun 2010 naik menjadi 33.621 ton. Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan luas panen dari sebesar 9.315 ha tahun 2010 menjadi 10.469 ha pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 Kabupaten Kutai Timur sebagai pemasok produksi padi, dengan menyumbang sebesar 6,08 persen dari total produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur (Statistik Daerah Kutai Timur 2012).

Tabel 2.87
Perkembangan Komoditas Perkebunan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Komoditi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Karet					
	Luas Tanaman (ha)		3.518,62	5.511,71	5.327,01	-
	Produksi (ton)		237,87	237,87	279,98	-
2	Kelapa					
	Luas Tanaman (ha)		2.569,44	2.150,18	1.659,07	-
	Produksi (ton)		2.418,22	847,40	1.000,91	-
3	Kelapa Sawit					
	Luas Tanaman (ha)		170.301,42	43.035,54	64.007,68	-
	Produksi (ton)		947.266,68	91.569,57	105.908,12	-
4	Kakao					
	Luas Tanaman (ha)		7.382,10	6.965,83	5.404,40	-
	Produksi (ton)		3.837,30	3.766,07	3.158,97	-
5	Lada					
	Luas Tanaman (ha)		231,30	227,35	264,50	-
	Produksi (ton)		120,09	58,01	107,00	-
6	Kopi					
	Luas Tanaman (ha)		310,28	288,85	230,45	-
	Produksi (ton)		184,00	194,10	81,18	-



Sumber: Statistik Daerah Kutai Timur 2012

Pengembangan pertanian khususnya komoditas kelapa sawit merupakan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dikenal dengan program **sejuta hektar kelapa sawit**. Sejak diwujudkan tahun 2005 hingga tahun 2011 luas tanaman kelapa sawit sudah mencapai 54.007,89 ha dengan produksi sebesar 185.968,12 ton. Sentra tanaman kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur berada di kecamatan Muara Wahau dengan luas 9.340,12 ha, kecamatan Kongkang 7.775,16 ha dan kecamatan Bengalon 7.178,27 ha. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kutai Timur, maka ke depan potensi perluasan kebun kelapa sawit akan dikembangkan di 13 (tiga belas) kecamatan terutama di kecamatan Muara Wahau, Kongkang dan Bengalon.

Secara umum perkembangan komoditas perkebunan sebagaimana Tabel 2.87 rata-rata mengalami peningkatan baik luas lahan maupun produksinya kecuali komoditi kopi dan kakao yang mengalami penurunan seiring dengan penurunan luas lahan.

2) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Seperti penjelasan pada bagian sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian merupakan terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Bila subsektor pertambangan ini tidak dilibatkan dalam perhitungan PDRB maka sektor pertanian merupakan sektor yang cukup menjanjikan di Kabupaten Kutai Timur. Maka benarnya bahwa kedepan Kabupaten Kutai Timur harus menggali potensi pertanian yang masih bisa dioptimalkan.

Pada tahun 2012 kontribusi terbesar dari sektor pertanian masih terdapat pada subsektor tanaman perkebunan yakni sebesar 10,58 persen. Subsektor tanaman pangan dalam kurun 2008-2012 masih mengalami pasang surut. Adapun kontribusi terkecil masih terdapat pada subsektor peternakan dan hasil-hasilnya. Sektor peternakan dan hasil-hasilnya selama 5 tahun berturut-turut terus-menerus mengalami penurunan persentasenya terhadap PDRB. Kondisi penurunan ini juga terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan.

Secara keseluruhan pada tahun 2008 hingga tahun 2011 persentase sektor pertanian mengalami penurunan namun pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan seperti pada Tabel 2.88



Tabel 2.88
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tanpa Migas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanaman bahan makanan	5,99	5,62	5,33	4,77	4,72
2	Tanaman perkebunan	8,41	8,22	8,94	9,20	10,58
3	Peternakan dan hasil-hasilnya	2,56	2,50	2,33	2,08	2,05
4	Kehutanan	8,51	7,65	6,73	5,58	5,23
5	Perikanan	3,90	4,17	4,18	4,00	4,27
Jumlah		29,38	29,17	27,50	25,63	26,86

Sumber: SIMELDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Pada Tabel 2.88 kontribusi PDRB sektor pertanian berdasarkan lapangan usaha terjadi naik turun dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah Tanaman Bahan Makanan dari 5,99 persen menjadi 4,72 persen, Peternakan dan hasil-hasilnya dari 2,56 persen menjadi 2,05 persen serta kehutanan dari 8,51 persen menjadi 5,23 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah tanaman perkebunan dari 8,41 persen menjadi 10,58 persen dan Perikanan dari 3,90 persen menjadi 4,27 persen.

3) Jumlah Populasi Peternakan

Salah satu arah kebijakan yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas peternakan lima tahun kedepan yakni pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan bisa menjadi komoditas ekspor.

Secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Kutai Timur cenderung fluktuatif. Penurunan populasi ternak pada tahun 2011 terjadi pada ternak sapi dan kerbau. Pada tahun 2011 tercatat 15.026 ekor menurun 17,50 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan ternak kerbau turun sebesar 12,07 persen. Kenaikan populasi ternak pada tahun 2011 terjadi pada kambing, tercatat sebesar 8.900 ekor.

Tabel 2.89
Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

No	Komoditi	2008	2009	2010	2011	2012
----	----------	------	------	------	------	------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peternakan						
1	Sapi (ekor)		16.576	19.145	15.026	-
2	Kerbau (ekor)		873	895	787	-
3	Kambing (ekor)		6.634	5.800	6.900	-
Ternak Unggas						
1	Ayam Kampung		544.195	557.800	557.800	-
2	Ayam ras pedaging		231.117	332.220	1.821.500	-
3	Ayam ras petelur				15.000	-
4	Itik		10.453	10.713	11.213	-

Sumber: Smreka Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Pada tahun 2011 populasi ayam ras pedaging tercatat paling banyak yakni 1.821.500 ekor diikuti ayam kampung sebanyak 825.00 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 15.000 ekor serta itik sebanyak 11.213 ekor

4) Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur

Kontribusi sektor pertanian merupakan terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Bila subsektor pertambangan ini tidak dilibatkan dalam perhitungan PDRB maka sektor pertanian merupakan sektor yang cukup menjanjikan di Kabupaten Kutai Timur. Maka kedepari Kabupaten Kutai Timur harus tetap menggali potensi pertanian yang masih potensial.

Tabel 2.90
Jumlah Produksi Daging dan Telur
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2010

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produksi Daging Ternak Besar (Ton)					
	Sapi		387,19	334,85	341,33	-
	Kerbau	-		4,44	1,35	-
	Kambing	-	17,86	5,36	3,82	-
2	Produksi Daging Unggas (Ton)					
	Ayam Kampung	-	426,00	818,33	819,33	-
	Ayam ras pedaging	-	289,90	903,30	1.629,00	-
	Ayam ras petelur	-	19,80	54,78	3,53	-
	itik	-	32,99	4,33	6,79	-
3	Produksi Telur Unggas (Ton)					
	Ayam Kampung	-	194,66	422,81	443,95	-
	Ayam ras petelur	-	289,05	201,94	465,48	-



luk	-	53,11	3,36	3,53	-
-----	---	-------	------	------	---

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Perkembangan produksi daging ternak besar tahun 2009-2011 mengalami penurunan produksi, sedangkan produksi daging unggas mengalami peningkatan produksi. Produksi utama hasil ternak adalah daging, telur, dan susu yang persediaannya dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan tingkat produktivitas ternak. Selain itu juga dipengaruhi oleh keluar masuknya ternak dan hasil ternak. Penyediaan produksi daging ditentukan oleh jumlah pemotongan ternak. Penyediaan produksi daging di Kabupaten Kutai Timur masih tergantung pada pemasukan ternak potong ke daerah ini.

Penyediaan produksi telur untuk dikonsumsi penduduk Kutai Timur tahun 2010 baru mampu sebesar 34,09 persen dari total produksi telur sebesar 34,09 persen dari total produksi telur sebesar 718 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 2.106,46 ton. Sementara itu penyediaan produksi daging untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 201 sudah mencapai 84,96 persen dari total produksi daging sebesar 2.148,18 ton bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi total penduduk sebesar 2.528,25 ton (Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012).

B. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan lindung luasnya 13,31 persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 9,98 persen, Hutan Produksi Terbatas 39,52 persen dan hutan produksi tetap sekitar 38,19 persen.

Kawasan hutan yang dimiliki, maka hasil hutan utama berupa kayu bulat di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari kurang lebih 12 jenis kayu dari 16 jenis kayu yang umumnya ada pada hutan Kalimantan Timur seperti meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, delutung, kayu indah, rengas, rosak dan lainnya. Di daerah ini jenis kayu yang paling banyak di eksploitasi adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai.



Tabel 2.91
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Lindung	270.720	270.726	317.200	317.200	317.200
2	Hutan Suaka Alam dan Wisata	219,385	219,385	184,764	184,764	184,764
3	Hutan Produksi Terbatas	868,778	868,778	839,200	839,200	839,200
4	Hutan Produksi Tetap	839,455	839,455	958,500	958,500	958,500
5	Hutan Tetap	1.927,618	1.927,618	1.980,464	1.980,464	1.980,464
6	Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi	1.043.716	1.043.716	1.043.716	1.043.716	1.043.716
7	Luas Hutan	2.198,344	2.198,344	2.198,344	2.198,344	2.198,344
8	Luas Wilayah	3.574,760	3.574,760	3.574,760	3.574,760	3.574,760

Sumber: - Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
- Kutai Timur Dalam Angka 2012

Perkembangan luasan hutan di Kabupaten Kutai Timur cenderung tetap, kecuali pada tahun 2010 terjadi peningkatan dan penurunan komposisi luasan hutan. Luasan hutan yang mengalami peningkatan adalah hutan lindung bertambah sebesar 17,17 persen, hutan produksi tetap sebesar 13,94 persen dan hutan tetap sebesar 19,20 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah hutan suaka alam dan wisata sebesar 15,78 persen serta hutan produksi terbatas turun sebesar 3,40 persen.

C. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral salah satunya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.92
Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Kutai Timur

No	Sumber Alam	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Minyak Bumi	Sengatta	6.000 ha
		Sangkulirang	12.000 ha
2	Gas	Bengalon	20.000 ha
		Teluk Grik Sangkulirang	11.000 ha
		Pulau Miang Besar	8.000 ha
3	Batu bara	Kabupaten Kutai Timur	Potensi seluruh kabupaten di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 3.352.473.000 ton
4	Emas	Kecamatan Muara Wahau	



		Sungai Pesab,	
		Kecamatan Muara Ancalong, Sungai Kelinjau, Sungai Apan	
		Kecamatan Busang; disekitar Mekar Baru	Eks. Rrs.X
		Kecamatan Sengatta, Sungai Sengatta	
		Kecamatan Telen; Sungai Telen, dan Sungai Marah	
5	Batu	Kecamatan Kelorung, Sangkulirang, Kongbang, dan Busang	
6	Batu Gamping	Kecamatan Kelorung, Gunung Sekerat	Areal 51.000 ha dan cadangan sekitar 18,6 milyar ton.
		Pengadan (Gunung Mendur)	
		Kecamatan Muara Ancalong; Long Isak	
7	Gypsum	Sungai Sekerat, Sungai Bengalon, dan Kalirang	Cadangan 18 juta ton.
8	Pasir Kuemas	Kecamatan Kelorung, Sangkulirang, Bengalon, Sondoran, Sengatta dan Muara Ancalong	Cadangan diperkirakan sebanyak 420 juta m ³ .
9	Lempung	Kecamatan Sangkulirang dan Kelorung	Terdapat cadangan lempung sebesar 2 milyar ton dengan luas areal 65.300 ha.
10	Logam	Muara Ancalong dan Sangkulirang	Depositi sebesar 75 juta ton.

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011, Data diolah

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang punya peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak bumi dan batubara. Pada tahun 2011, produksi minyak bumi sebesar 617,90 barrel, menurun tajam dibanding tahun sebelumnya. Hal yang berbeda terjadi pada perkembangan produksi batubara, yang mencapai produksi 57,98 juta ton pada tahun 2011 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2010 dengan produksi sebesar 39,95 juta ton. Hasil produksi tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan penyangga terbesar ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu juga hasil tambang batubara Kutai Timur digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Tabel 2.93
Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Produksi	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Minyak Bumi (barrel)	-	1010.250	738.438	617,90	-
2	Batubara (M tone)	-	36.154.491	34.951.441	57.982.231	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



Perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Galian A (pertambangan minyak dan gas bumi)	3,58	3,47	2,20	1,89	1,71
2	Galian B (pertambangan non minyak dan gas bumi)	81,55	81,58	84,05	86,00	86,73
3	Galian C (penggalian)	0,77	0,78	0,68	0,57	0,53
	Total	85,89	85,83	86,91	88,43	88,96

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

*) Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai 88,96 persen pada tahun 2012. Bila dirinci kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B (pertambangan non minyak dan gas bumi) berkontribusi paling tinggi yakni berkisar sebesar 86,73 persen, kemudian diikuti subsektor Galian A (pertambangan minyak dan gas bumi) sebesar 1,71 persen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53 persen. Namun besarnya kontribusi terhadap PDRB tersebut harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan cadangan sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.

D. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor ini memberikan peluang bageraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis baik wisatawan nusantara (wionu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata



merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.93 dapat dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga 2011 terus-menerus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebanyak 7.312 orang meningkat menjadi 17.864 orang pada tahun 2011. Adapun rincian kunjungan tersebut, sebagian besar tertuju pada wisata ke pantai sebanyak 10.529 orang atau sekitar 58,94 persen. Sedangkan kunjungan menuju pegunungan sebanyak 4.780 orang atau sekitar 26,76 persen. Adapun kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi yakni sebanyak 2.555 orang atau berkisar 14,30 persen dari total kunjungan wisata yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.95
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No.	Jenis Obyek Wisata	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pantai	5.075	9.185	10.150	10.529	-
2	Pegunungan	1.212	4.518	4.732	4.780	-
3	Hutan	1.025	2.061	2.389	2.555	-
	Jumlah Kunjungan	7.312	15.754	17.251	17.864	64.999

Sumber: SIM IEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

E. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu (*backward linkage*) maupun hilir (*forward linkage*), dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 2.96 tampak bahwa jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Kutai Timur jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2008-2012 terus-menerus mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari minat masyarakat terhadap ikan. Bila permintaan ikan mengalami peningkatan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan serta para pembudidaya ikan.



Tabel 2.96
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah rumah tangga perikanan	-	-	12.517	6.700	-
2	Jumlah produksi (kg)	6.576,47	11.940,9	14.025	10.116	-
3	Konsumsi total per tahun (kg)	30,76	48,57	53,33	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Jumlah produksi dan konsumsi ikan dari tahun 2008 hingga 2010 terus mengalami peningkatan. Jumlah produksi telah meningkat dari 6.576 kg pada tahun 2008 menjadi 14.025 kg pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3.909 ton, sehingga produksinya menjadi sebesar 10.116 ton. Adapun konsumsi total per tahun juga mengalami hal yang sama dari 30,76 kg pada tahun 2008 menjadi 53,33 kg pada tahun 2010. Situasi ini tidak lepas dari kesederhana masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai bahan pangan yang memiliki nilai protein tinggi dan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan turut memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi masih relatif kecil pada PDB Kutai Timur, bahkan cenderung mengalami penurunan. Kontribusi PDRB sektor perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2008 adalah Rp 109.090,09 juta atau sama dengan 0,67 persen, pada tahun 2010 naik menjadi Rp 196.281,71 juta.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun dalam pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah yang akan dihadapi. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktifitas pada umumnya masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan penyediaan produksi ikan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kutai Timur ternyata baru mampu sebesar 42,39 persen dari total



produksi sebesar 5.202,60 ton dibanding kebutuhan konsumsi penduduk yang mencapai 12.272,06 ton.

Pemenuhan pangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat serta kurangnya pengetahuan keluarga terhadap konsumsi pangan dan gizi mengakibatkan belum tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang diirinkan dengan tingkat konsumsi energi, protein, lemak dan vitamin. Hingga saat ini konsumsi perkapita ikan di Kutai Timur masih rendah, yaitu sekitar 14,1 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tingkat nasional ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dari 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 38,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2014.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Produktivitas per sektor dapat mencerminkan kemampuan ekonomi daerah. Berdasarkan Tabel 2.97 berikut dapat diketahui bahwa produktivitas sektoral di Kabupaten Kutai Timur masih belum beranjak dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor tersebut mengalami peningkatan cukup tajam setiap tahunnya. Bahkan sektor ini belum mampu tergantikan oleh sektor-sektor lainnya mengingat sektor begitu dominan dalam perekonomian daerah. Kemampuan sektor tersebut tampak dari kontribusinya dalam perekonomian daerah Kabupaten Kutai Timur hingga mencapai 85 persen lebih.

Tabel 2.97
Produktivitas Per Sektor
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



1.1	Pertanian	1.088.884,71	4,37	1.128.884,44	4,34	1.404.220,77	4,34				
1.2	Pertanian & Penggalan	23.432.641,18	115,97	23.432.641,18	115,97	23.432.641,18	115,97				
1.3	Industri Pengolahan	50.701,40	0,20	50.701,40	0,20	50.701,40	0,20				
1.4	Listrik, Gas & Air Bersih	33.600,40	0,11	33.600,40	0,11	33.600,40	0,11				
1.5	Konstruksi	783.660,87	2,30	783.660,87	2,30	783.660,87	2,30				
1.6	Perdagangan Hotel & Restoran	1.128.455,18	3,49	1.128.455,18	3,49	1.128.455,18	3,49				
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	651.587,40	1,98	651.587,40	1,98	651.587,40	1,98				
1.8	Kuangan, sewa, dan jasa perusahaan	274.334,46	0,90	274.334,46	0,90	274.334,46	0,90				
1.9	Jasa-jasa	100.484,00	0,28	100.484,00	0,28	100.484,00	0,28				
	JUMLAH	31.493.450,03	-	31.493.450,03	-	31.493.450,03	-				

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur 2012

Kemampuan sektor lainnya selain sektor pertambangan dan penggalan adalah sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Produktivitas sektor pertanian mencapai Rp 1.404.220, - atau lebih kurang 4,34 persen dari PDRB tahun 2010. Adapun sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki produktivitas hingga Rp 1.128.455,- atau lebih kurang 3,49 persen dari PDRB tahun 2010. Adapun keempat sektor lainnya yakni sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, dan sektor Jasa-jasa memiliki produktivitas yang tidak lebih dari 2 persen dari PDRB.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja:

1) Aksesibilitas Daerah

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Arus lalu lintas pengguna jalan semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu signifikan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 179,03 persen. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.90



Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan	1.379,30	1.616,23	1.620,23		
2	Jumlah Kendaraan (unit)	31.641	39.811	60.976		
3	Pertumbuhan	22,939	24,832	37,634		

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya dapat dilawati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalui darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaan jalannya aspal yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

Sementara itu kepadatan jaringan jalan di dalam kota yang diambil sampel pada Jl. Yos Sudarso menunjukkan tingkat kepadatannya meningkat pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 35 unit per jam menjadi 47 unit per jam atau mengalami pertumbuhan 34,29 persen.

Tabel 2.99
Kepadatan Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2009-2011

No	Kepadatan Jaringan	2009	2010	2011*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Samarinda-Sangatta, dengan lokasi survey pada jalan Walter	47 unit/jam		
2	Yos Sudarso Sangatta			
	• Yos Sudarso I	52 unit/jam	699 unit/jam	699 unit/jam
	• Yos Sudarso II	55 unit/jam	1.534 unit/jam	1.534 unit/jam
	• Yos Sudarso III	55 unit/jam	1.392 unit/jam	1.392 unit/jam
	• Yos Sudarso IV	53 unit/jam	1.509 unit/jam	1.589 unit/jam

Sumber: SIMPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

*) Angka Sementara



a) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang. Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Mobilitas orang maupun barang dengan angkutan barang di Kabupaten Kutai Timur tampak dalam Tabel 2.97. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah barang yang terangkut melalui bandara selalu meningkat dari tahun 2008 hingga 2009. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada angkutan umum lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu, juga risiko dalam perjalanan dapat diminimalkan.

Tabel 2.100
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelabuhan	426.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bandara	31.239	40.119	30.883	43.452	-	-	-	-	-	-
3	Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	457.476	40.119	30.883	43.452	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2) Penataan Wilayah

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti kataatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Luas Wilayah Produktif, Luas Wilayah Industri, Luas Wilayah Rawan Banjir, Luas Wilayah Kekeringan dan Luas Wilayah Perkotaan.

Tabel 2.101
Rasio Kotaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif,
Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi RTRW	-	-	-	-	-
2	Rencana Peruntukan RTRW	-	-	-	-	-
3	Rasio (1/2)	-	-	-	-	-
4	Luas Wilayah Produktif	-	-	-	-	-



5	Rasio (4/14)	-	-	-	-	-
6	Luas Wilayah Industri	-	-	-	-	-
7	Rasio (6/14)	-	-	-	-	-
8	Luas Wilayah Rawan Banjir	-	-	-	-	-
9	Rasio (8/14)	-	-	-	-	-
10	Luas Wilayah Kekeringan	-	-	-	-	-
11	Rasio (10/14)	-	-	-	-	-
12	Luas Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
13	Rasio (13/14)	-	-	-	-	-
14	Luas Seluruh Wll. Budidaya	-	-	-	-	-

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

3) Fasilitas Bank dan Non Bank

Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. Hingga tahun 2010 jumlah perbankan umum yakni dari jenis konvensional dan syariah masing-masing berjumlah 7 buah bank konvensional dan 1 buah bank syariah. Adapun jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih berjumlah 1 buah bank konvensional. Dengan perkembangan Kabupaten Kutai Timur yang semakin pesat, diharapkan jumlah perbankan baik konvensional maupun syariah dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa aktivitas perekonomian yang semakin tinggi akan selalu membutuhkan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana pembayaran, perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.102
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bank Umum					
	Konvensional	-	6	7		
	Syariah	-	-	1		
2.	BPR					
	Konvensional	-	-	1		
	Syariah	-	-			

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

4) Ketersediaan Air Bersih

Dengan terselurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80 persen kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap



melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dari tahun 2000 hingga 2008 mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa transisi dimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru 5,95 persen rumah tangga yang mendapat saluran air bersih, dan terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 12,36 persen. Namun pada tahun 2007-2008 turun menjadi sekitar 12,07 persen dan 11,81 persen pelanggan yang mendapat layanan air bersih.

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Keterediaan Air Bersih salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih untuk minum tidak hanya bersumber dari PDAM. Dari tabel yang ada sumber air minum rumah tangga banyak yang menggunakan air sungai. Pada tahun 2007 berturut-turut dari persentase terbanyak sumber air yang digunakan adalah 25,40 persen rumah tangga menggunakan air sumur tidak terlindung, 24,33 persen rumah tangga menggunakan air sungai, dan 16,01 persen menggunakan air ledeng (PDAM) untuk air minum.

Tabel 2.103
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sumber Air Bersih	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ledeng (Perpipaan)	16,01	4,94	5,19	-	-
2	Sumur Lindung	12,43	11,31	13,15	-	-
3	Sumur Tidak Terlindung	25,40	15,74	15,85	-	-
4	Mata Air Terlindung	1,01	8,84	0,22	-	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	1,81	4,01	0,22	-	-
6	Sungai	24,33	20,43	12,85	-	-
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8	Air Hujan	5,33	9,64	0,85	-	-
9	Air Kumbahan	12,23	25,15	39,54	-	-
10	Lainnya	-	-	-	-	-
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	-	-	-	-
12	Jumlah Rumah Tangga	53.481	85.014	77.031	-	-
13	Persentase Rumah Tangga	-	-	-	-	-



yang menggunakan air bersih (11/12)						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Bila dilihat jumlah pelanggan air bersih dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan itu adalah peningkatan volume air bersih yang digunakan. Tahun 2000 jumlah pelanggan mencapai 2.246 pelanggan dengan debit air baku utama 940.068 m³ dan meningkat pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 6.329 dengan debit air baku mencapai 3.650.000 m³. Persentase air yang digunakan terhadap air baku yang tersedia pada tahun 2000 sebesar 53,27 persen dan ditahun 2008 turun menjadi 37,03 persen. Dengan kata lain peningkatan pelanggan belum maksimal bila melihat masih rendahnya pemanfaatan air bersih yang tersedia.

5) Fasilitas Listrik dan Telepon

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Fasilitas Listrik dan Telepon salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73 persen rumahtangga yang mendapat aliran listrik PLN, dan turun ditahun 2002 menjadi 26,71 persen. Persentase pemenuhan listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 32,43 persen, namun turun kembali hingga sekitar 29,94 person rumahtangga pelanggan listrik.

Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggan, penggunaan listrik masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Tahun 2000 sekitar 33,53 persen pelanggan listrik adalah rumahtangga dari 10.460 jumlah pelanggan, dan ditahun 2008 turun menjadi 31,48 persen adalah rumahtangga dari 15.507 pelanggan dan selebihnya digunakan untuk usaha dan penerangan fasilitas umum.

Produksi listrik di Kutai Timur setiap tahun mengalami lonjakan pemakaian yang cukup tajam. Pada tahun 2000 produksinya mencapai 24.952 MWH dan meningkat tajam menjadi 72.808,08 MWH ditahun 2008 atau naik sekitar 65 persen. Dari produksi listrik yang ada terjual sebesar 24.717 MWH ditahun 2000 dan 66.625 MWH ditahun 2008. Atau jika diprosentasakan dari hasil yang diproduksi pada tahun 2000 terjual 99,06 persen dan turun ditahun 2008 menjadi 91,51 persen.



Masih rendahnya persentase kemampuan PLN dalam memenuhi fasilitas penerangan rumah tangga, maka untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga diperoleh dari berbagai sumber penerangan. Selama tahun 2000 hingga 2008 sekitar 22,52 persen menggunakan listrik non PLN dan selebihnya terutama untuk daerah pedesaan menggunakan non listrik seperti petromak, palita dan suntin. Dari data yang ada ternyata pelanggan listrik PLN yang ada hanyalah pada kecamatan-kecamatan tertentu saja. Dari 18 kecamatan yang ada yang teraliri listrik PLN 51,11 persen [11 kecamatan].

Tabel 2.104
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kebutuhan						
	- Rumah tangga	MWH	60.849,08	50.820,55	55.658,38		
	- Komersial	MWH	3.544,58	11.895,32	14.322,00		
	- Publik	MWH	2.131,05	7.899,77	7.855,68		
	- Industri	MWH	-	-	-		
2.	Susut & Losses (TRD)	MWH	4.425,14	6.787,88	6.811,75		
3.	Susut Pemakaian Sendiri	MWH	1.757,80	1.297,24	169,08		
4.	Total Susut & Losses	MWH	-	-	-		
5.	Faktor Beban	MWH	-	-	-		
6.	Produksi	MWH	72.809,06	78.043,40	88.794,91		
7.	Defisit Puncak	MWH	-	-	-		
8.	Kapasitas Tersesang (Existing)	MWH	23.504,00	25.143,00	32.180,00		

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

b) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Tabel 2.105
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RT dengan daya 450 watt	430	510	-	-	-
2.	RT dengan daya 900 watt	14.186	14.092	-	-	-
3.	RT dengan daya 1.300 watt	825	857	-	-	-
4.	RT dengan daya 2.200 watt	-	-	-	-	-
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	-	-	-	-	-
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	14.186	14.092	16.255	-	-
7.	Jumlah Rumah Tangga	53.481	65.014	77.031	-	-
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	26,52	21,67	21,10	-	-

[illegible]

Number:

- SIMRECA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Kalimantan Timur Dalam Angka 2012
- Data diolah

5) Ketersediaan Penginapan

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari luar untuk mengadu nasib. Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka mencari tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dari lokal maupun asing.

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari Tabel 2.108 berikut. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup cepat terutama dari tahun 2008 (79 buah) meningkat hingga tahun 2010 jumlah penginapan maupun hotel telah berubah menjadi 95 buah.

Tabel 2.106
Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sarana/Prasarana	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penginapan/Hotel	79	82	85	-	-
2	Jumlah Kamar	1.177	1.230	1.290	-	-
3	Jumlah Tempat Tidur	1.710	1.830	1.950	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



Ketersediaan kamar juga mengalami peningkatan cukup berarti terutama pada tahun 2006 sebanyak 814 kamar menjadi 1.177 kamar, bahkan melonjak menjadi 1.290 kamar pada tahun 2010. Perkembangan jumlah tempat tidur untuk memenuhi permintaan para pendatang juga mengalami lonjakan dari tahun 2008 (1.256 buah) melonjak menjadi 1.710 buah tempat tidur. Hingga tahun 2010 jumlah tempat tidur telah berjumlah 1.950 buah. Bila melihat perkembangan pendatang/imigran yang terus-menerus meningkat, maka sangat dimungkinkan kebutuhan akan jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur masih terus meningkat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Iklim Investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Angka Kriminalitas

Berdasarkan tampilan data pada Tabel 2.107 berikut dapat dilihat uraian tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Dari tahun ke tahun angka kriminal yang terjadi mengalami penurunan yang signifikan. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 angka tindak pencurian terjadi kenaikan kejadian perkara menjadi 93 kasus dari sebelumnya di tahun 2008 sebanyak 85 kasus.

Tabel 2.107
Angka Kriminalitas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Kasus Narkoba	11	18	22	-	-
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	1	2	-	-
3	Jumlah Kejahatan Seksual	2	8	5	-	-
4	Jumlah kasus Penganiayaan	31	34	27	-	-
5	Jumlah kasus Pencurian	85	75	93	-	-
6	Jumlah kasus Penipuan	7	7	7	-	-



7	Jumlah kasus Permafuan uang	1	-	1		
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 thn	317	225	220		
9	Jumlah Penduduk	213.752	245.815	262.972		
10	Angka Kriminalitas: $[R]/[P]$	0,001	0,001	0,001		

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Profil Kabupaten Kutai Timur 2010

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan.

Tabel 2.108
Lama Proses Perijinan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

No	Uraian	Lama mengurus (hari)
(1)	(2)	(3)
1	SIUP	3 sd 7 hari kerja
2	TDP	3 sd 7 hari kerja
3	SIUK	5 hari kerja
4	IMB	14 hari kerja
5	HO	10 hari kerja



Sumber: Data Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur

3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penentu pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajak maupun retribusi sebagai sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan (SKPD/lembaga) dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Pengeluaran pembangunan dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari pajak. Disamping itu pajak dan retribusi yang sudah dipungut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.109 berikut tampak bahwa selama periode 2008-2012 jumlah obyek pajak tidak mengalami peningkatan. Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut terus mengalami peningkatan yakni dari tahun 2008 sebanyak 18 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2010. Dari angka 18 tersebut terdapat 4 jenis retribusi yang dikategorikan mendukung iklim investasi. Adanya retribusi yang mendukung investasi ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Kebijakan yang terkait dengan retribusi yang mendukung iklim investasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.109
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	6	6	6		
2	Jumlah insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	N/A	N/A	N/A		
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	18	18	18		
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	4	4	4		



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Proses pembangunan dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas seseorang. Produktivitas inilah yang berperan dalam penggerak pembangunan. Dari sumber daya manusia yang berketrampilan dan berproduktivitas pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.110 berikut tampak bahwa jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kalimantan Timur masih memerlukan upaya serta kerja keras. Dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 191 orang dan lulusan S3 hanya 3 orang, maka rasio lulusan sarjana S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk hanya berkisar 0,0074. Tentu saja rasio ini masih memerlukan upaya usaha keras untuk meningkatkan jumlah sekaligus rasio mencapai jenjang lebih baik dan ideal.

Tabel 2.110
Rasio Lulusan S1/S2/S3
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2008	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah lulusan S1	1.771	-	-	-	-
2	Jumlah lulusan S2	191	-	-	-	-
3	Jumlah lulusan S3	3	-	-	-	-
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.965	-	-	-	-
5	Jumlah penduduk	262.072	-	-	-	-
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,0074	-	-	-	-



Sumber: Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Tahun 2012

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh penduduk dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 2.111 berikut menjelaskan kondisi rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2013. Rasio ketergantungan penduduk dalam periode tersebut mencapai angka 51 pada tahun 2009. Angka 51 tersebut mengisyaratkan bahwa dari 100 penduduk bekerja akan menanggung 51 penduduk yang tidak bekerja. Berdasarkan tabel ini juga bahwa salah satu penyebab tingginya rasio ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan masih tingginya angka fertilitas terutama pada penduduk muda yakni kelompok 15 tahun ke bawah. Namun demikian pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi penurunan rasio ketergantungan dimana tahun 2013 sebesar 38.

Tabel 2.111
Rasio Ketergantungan Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	71.603	74.823	106.884	144.542	140.225
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	11.030	14.244	9.422	8.327	11.146
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif [1] & [2]	82.633	89.067	116.306	152.869	151.374
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	163.181	173.905	314.550	360.983	398.055
5	Rasio ketergantungan [3]/[4]	51	51	37	42	38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 (diolah)



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 untuk implementasinya tahun ke-3 sesuai dengan prioritas pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2013 maupun evaluasi dengan indikator-indikator RPJMD dapat dijabarkan berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.112 di bawah ini:



Tabel 2.112
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2013 Dan Realisasi RPJMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka merekrutur	97,80%	98,28%	Disdik
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka rata-rata lama sekolah	8,62	8,49	Disdik
1.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	minimal 98%	119,58%	Disdik
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Faket B	minimal 97%	101,31%	Disdik
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	70,83%	82,58%	Disdik
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	minimal 97,30%	99,36%	Disdik
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Faket B	Minimal 76%	66,53%	Disdik
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	60%	60,78%	Disdik
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	Minimal 99%	99,66%	Disdik
1.01.34	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	Minimal 96%	97,01%	Disdik
1.01.41	Program Pendidikan Tercapak Anak Berkebutuhan Khusus (Inklus)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 74,58%	60,78%	Disdik
		Rasio ketersediaan sekolah/pencuduk usia sekolah (SD)	43,95%	59,56%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	43,22%	56,29%	
		Rasio guru/murid (SD)	Minimal 95%	14,98	
		Rasio guru/murid (SMP)	Minimal 93%	13,08	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA/SMK)	44,48%	39,6%	
		Rasio guru terhadap murid	29,01%		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ditias 90%		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Ditias 90%		
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Minimal 95%	87,12	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09%	0,10%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,21%	0,19%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,21%	0,20%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	minimal 99%	99,94%	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	minimal 99%	99,00%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91,55%	94,50%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Minimal 97,5%	95,38%	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/C IV	50,79%	64,68	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.02.	Kesehatan				
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka kelangsungan hidup bay	92,67	85,44	Dinkes, RSUD
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka usia harapan hidup	70,91	-	Dinkes, RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rasio penyandu per satuan salita	11,37	5,73	Dinkes, RS. ID
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio puskesmas, poliklinik, pusbu per satuan penduduk	Minimal 0,45	-	Dinkes, RSUD
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio Rumah Sakt per satuan penduduk	Minimal 0,02	0,02	Dinkes
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39	0,39	Dinkes
1.02.16	Program Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74	2,51	Dinkes
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	32,42%	Dinkes, RSUD
1.02.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %	38,39%	Dinkes, RSUD
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Minimal 55 %	73,33%	Dinkes
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Balita Gizi Buruk mencapai persentase	100 %	100%	Dinkes
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Minimal 70%	42,90%	RSUD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %	100%	Dinkes
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	84%	24,38%	RSUD
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %	61,85%	RSUD
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan puskesmas	Minimal 100,56 %	113,67	RSUD
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas pembantu	74,15%	84,44	Dinkes
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Dinkes
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan				Dinkes, RSUD
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				Dinkes
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat				Dinkes
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.03.	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%		DPU
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Jaringan Irigasi	70%	75%	DPU
1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio tempat ibadah per satuan (seribu) penduduk	3,00	2,94	DPU
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Corong-Gorong	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70,0%	-	DPU
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai Standar	27,71	DPU
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80%	-	DPU
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %	134%	DPU
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Rasio pemukiman layak huni	58,80%	85%	DPU
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rasio panjang jalan dilalui Roda 4	0,0056	80	DPU
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Parang jalan yang memiliki saluran dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15	0,1	DPU
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,07%	0,16	DPU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Sempadan sungai yang dipakai bangunan jalan	68%	-	DPU
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30,94%	40,50%	DPU
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	Luas jangsi Kabupaten dalam kondisi baik	59,56%	74,99	DPU
1.03.37	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				DPU
1.03.38	Pembuatan Sistem Informasi dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur				DPU
1.03.39	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan				DPU
1.03.40	DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota				DPU
1.03.41	DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota				DPU
1.03.42	Swakelola Bidang Data Karya				DPU
1.04.	Perumahan				
1.04.18	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kecelakaan	Rumah tangga pengguna air bersih	75,44	-	DPU
		Rumah tangga pengguna listrik	Minimal 30 %	-	
		Rumah tangga ber-Sanitasi	70,0%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
		Rumah layak huni	Minimal 85 %	134%	
1.05.	Penataan Ruang				
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	minimal 40%	-	BPLTR
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	tidak minimal 10%	100%	BPLTR
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	-	
		Ketersatan terhadap RTRW	100%	-	
1.06.	Perencanaan Pembangunan				
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Bappeda
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Bappeda
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Bappeda



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.06.08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Bappeda
1.06.15	Program Pengembangan data/informasi				Bappeda
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah				Bappeda
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				Bappeda
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya				Bappeda
1.06.26	Program Perencanaan Tata Ruang				Bappeda
1.07.	Perhubungan				
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angkutan Umum Darat	75.880	-	Dishub
1.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Angkutan Umum Laut/ Udara	587	-	Dishub
1.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persijil trayek	0,11	-	Dishub
1.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah uji kin angkutan umum	317	-	Dishub
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terminal	11	12	Dishub
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	Pelabuhan Laut	2	2	Dishub



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Relabuhan Udara	11	11	Dishub
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan darat	0,55	-	Dishub
1.07.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kepemilikan KR angkutan umum	1,00	-	Dishub
1.07.20	Program peningkatan kelancaran pengoperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KR)	Maksimal 1 hari	25-26 menit	Dishub
1.07.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Sesuai Standart	-	Dishub
1.07.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemasangan Rambu-rambu	Sesuai Standart	-	Dishub
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,18%	-	
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Meningkat	Meningkat	
1.08.	Lingkungan Hidup				
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penanganan sampah	70%	-	BLH
1.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penduduk berakses air minum	minimal 60 %	-	BLH
1.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase L.Les pamukiman yang tertata	naik minimal 10%	-	BLH
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelompokan kualitas air (pemisahan kelas air)	32%		BLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	44%	-	BLH
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	100%	-	BLH
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan penetapan status mutu air	29%	-	BLH
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cagar Budaya Sumber daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan eridol	Minimal 80 %	87	BLH
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %	-	BLH
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi laut dan hutan	Penegakan hukum lingkungan	40%	100	BLH
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	52%	-	BLH
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				BLH
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam				BLH
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial				BLH
1.09.	Pertanahan				
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase luas lahan bersertifikat	Naik Minimal 10%	-	BPLTR
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	-	BPLTR
1.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelesaian izin lokasi	100%	-	BPLTR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BPLTR
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				BPLTR
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan				BPLTR
1.09.19	Program Pertanahan				BPLTR
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Minimal 90 %	-	Discapil
1.10.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio bayi berakte kelahiran	100%	-	Discapil
1.10.13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio pasenger berakte nikah	Minimal 75 %	-	Discapil
1.10.16	Program Keluarga Berencana	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %	-	Discapil
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %	-	
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Lengkap	Ada	
		Persebaran KTP Nasional berbasis NIK	80%		
1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%		BPPKE
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%		BPPKE



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio KDRH	Menurun	45,83	BPPKB
1.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	-	BPPKB
1.11.07	Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35% - 50%	35,30%	BPPKB
1.11.08	Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan	100%	100%	BPPKB
1.11.09	Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/d 3 anak	2 s/d 3 anak	BPPKB
1.11.10	Program PIK - KRR	Rasio akseptor KB	85,39	71	BPPKB
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan peserta KB aktif	85,39	85,39%	BPPKB
1.11.20	Program Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21,93%	21,39%	BPPKB
1.11.26	Program Penguatan KKB				BPPKB
1.11.27	Program Penyediaan Tenaga Peningkat Kelompok Bina Keluarga (IMP) / Penyediaan dukungan operasional IMP				BPPKB
1.11.28	Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Bagi Kelompok UPPKS				BPPKB
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				BPPKB
1.13.	Sosial				
1.13.D1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40,25%	91,11%	Dinasos



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71,83%	89,12%	Dinsos
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Dinsos
1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Dinsos
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				Dinsos
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar				Dinsos
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				Dinsos
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompa				Dinsos
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				Dinsos
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.22	Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.23	Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana				Dinsos
1.14.	Ketenagakerjaan				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat	-	Dinasakertrans
1.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pengangguran terbuka	4,25 %	-	Dinasakertrans
1.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio penduduk yang bekerja	76,07	-	Dinasakertrans
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Pengangguran	4,28	-	Dinasakertrans
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	2.458,31	-	Dinasakertrans
1.14.16	Program Peningkatan Kemampuan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio ketergantungan	33,45	38	Dinasakertrans
1.14.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				Dinasakertrans
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja				Dinasakertrans
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)				Dinasakertrans
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)				Dinasakertrans
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase koperasi aktif	Meningkat	Meningkat	Diskop
1.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Meningkat	Meningkat	Diskop



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah BPR/LKM	Meningkat	Meningkat	Diskop
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Diskop
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				Diskop
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelangkaan Koperasi				Diskop
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia LKM (Usaha Kecil Menengah)				Diskop
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian				Diskop
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah				Diskop
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri				Diskop
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi				Diskop
1.16.	Penanaman Modal Daerah				
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	Meningkat	BPMD
1.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	Meningkat	BPMD
1.16.03	Program peningkatan kualitas aparatur				BPMD
1.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BPWD
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				BPWD
1.16.16	Program Peningkatan Idm Investasi dan Realisasi Investasi				BPWD
1.16.17	Program Penyisipan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				BPWD
1.17.	Kebudayaan				
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	13 kali	3	Disorper
1.17.20	Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	13 kali	4	Disorper
1.17.21	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	Disorper
1.17.22	Evaluasi Pelaporan Keanggotaan Budaya	Jumlah gedung kesenian	3	-	Disorper
1.17.23	Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah				Disorper
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya				Disorper
1.17.26	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat				Disorper
1.17.27	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah				Disorper
1.18.	Pemuda dan Olah Raga				
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah organisasi pemuda	Minimal Sesuai dg Kondisi Existing	33	Disorper



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat	Jumlah organisasi olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	43	Disporpar
1.18.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	5	Disporpar
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	16	Disporpar
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Gelombang / bela remaja (selain milik swasta)	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	-	Disporpar
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	3	-	Disporpar
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga				Disporpar
1.18.25	Program Pembinaan Olahraga Berbakat				Disporpar
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan pembinaan terhadap LSV, Ormas dan CKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	-	Bakesbang
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	-	Bakesbang
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparat				Bakesbang
1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat				Bakesbang
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Bakesbang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.19.16	Program pemeliharaan kantrantihmas dan pencegahan tindak kriminal				Bakasbang
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				Bakasbang
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kesmahan				Bakasbang
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Din Masyarakat Daerah				Bakasbang
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat	-	
1.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat	-	
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Naik Minimal 10% dari sebelumnya	-	
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pertumbuhan ekonomi	Minimal 7%	-	
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kemiskinan	7,13	-	
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintahan Daerah	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penegakan PERDA	100%	-	
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) di Kabupaten	100%	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	-	
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	-	
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Sistem Informasi Manajemen Pemda	ada	ada	
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDI	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	minimal 90%	-	
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemerkas dan aparatur pengawasan	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	7.882.007	-	
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jenis dan jumlah bank dan cabang	13	26	
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengadilan masyarakat	Angka kriminalitas	maksimal 3,52	-	
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Lama proses perijinan	3 hari	-	
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	27 macam	-	
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri				
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan				
1.20.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa				
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia				
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perencanaan				
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.48	Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan				
1.20.49	Program Pengembangan Kodiklat				
1.20.50	Program Penelitian dan Pengembangan				
1.20.51	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan				
1.21.	Ketahanan Pangan				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	EKPP
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pangan utama	45.793	43.170	EKPP
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				EKPP
1.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BKPP
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				BKPP
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan				BKPP
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				BKPP
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata umlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	13	Bapemas
1.22.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	135	Bapemas
1.22.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Posyandu aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	135	Bapemas
1.22.15	Program Peningkatan Keardayaan Masyarakat Pa desaan				Bapemas
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				Bapemas
1.22.21	Program Penanggulangan Kemiskinan dan ketentanan				Bapemas
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas Kemandirian Pemerintah Desa				Bapemas
1.24.	Kearsipan				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Buku 'Kabupaten dalam angka'	Ada	Ada	Kantor arsip
		Buku 'PDRS kabupaten'	Ada	Ada	
1.25.	Perpustakaan				
1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan	-	Kantor arsip
1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat	-	Kantor arsip
1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat	-	Kantor arsip
1.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Kantor arsip
1.25.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				Kantor arsip
2.	Urusan Pilihan				
2.01.	Pertanian				
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	52 kw/ha/tahun	44.65kw/ha/tahun	Distan, Disbun
2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	produksi padi (ton)	45.793	-	Distan, Disbun
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5.73%	-	Distan, Disbun
2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kontribusi sektor pertanian (pawije) terhadap PDRB	1.11%	-	Distan, Disbun
2.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.88%	-	Distan, Disbun



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Cakupan dina kelompok petani	100%	-	Distan, Disbun
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	9 - 19 Juta	-	Distan, Disbun
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				Distan, Disbun
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				Distan, Disbun
2.01.20	Program pembudayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				Distan, Disbun
2.01.21	Program pencegahan dan penanganan penyakit ternak				Distan, Disbun
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				Distan, Disbun
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				Distan, Disbun
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				Distan, Disbun
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				Distan, Disbun
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman				Distan, Disbun
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan				Distan, Disbun
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				Distan, Disbun
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan				Distan, Disbun
2.02.	Kehutanan				
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	44%	-	Dishut



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kerusakan Kawasan Hutan	22%	-	Dishut
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDDB	1.40%	-	Dishut
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan				Dishut
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				Dishut
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan				Dishut
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan				Dishut
2.03.	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pencampuran tanpa ijin	0%	-	Disamban
2.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDDB	80.01%		Disamban
2.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Disamban
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengaparan Laporan Kinerja dan Keuangan				Disamban
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Disamban
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				Disamban
2.03.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas				Disamban
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT				Disamban
2.03.21	Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan				Disamban



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.03.22	Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar				Ditamban
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Batu bara Kabupaten Kutai Timur				Ditamban
2.03.24	Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur				Ditamban
2.04.	Parwisata				
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	23.251	24.350	Diserpor
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,25%	-	Diserpor
2.04.17	Program Pengembangan Kemithaan				Diserpor
2.05.	Kelautan dan Perikanan				
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produk perikanan	100%	-	Diskaulaut
2.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat	Konsumsi ikan	65,64%	-	Diskaulaut
2.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Cakupan hnta kelompok nelayan	77%	-	Diskaulaut
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaparan Capaian Kinerja dan Keuangan	Produksi perikanan kelompok nelayan	80,26%	-	Diskaulaut
2.05.07	Program Peningkatan Kerjasama				Diskaulaut
2.05.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Diskaulaut
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				Diskaulaut
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				Diskaulaut



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya laut				Diskanlaut
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat				Diskanlaut
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan				Diskanlaut
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				Diskanlaut
2.05.22	Program pengembangan sistem Perikanan perikanan				Diskanlaut
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				Diskanlaut
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				Diskanlaut
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan				Diskanlaut
2.05.27	Program Identifikasi (in Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan				Diskanlaut
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				Diskanlaut
2.06.	Perdagangan				
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,98%		Disperindag
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (juta USD)	4,940,567		Disperindag
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.	Industri				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0,35%	-	Disperindag
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertumbuhan Industri	Minimal 1	-	Disperindag
2.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Disperindag
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Disperindag
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				Disperindag
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Disperindag
2.07.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Disperindag
2.08.	Ketransmigrasian				
2.08.18	Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi				Dinas transmigrasi



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang baik sehingga kebijakan publik memiliki timbangan yang memadai sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

A. Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil analisis capaian aspek dan urusan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan permasalahan pembangunan diantaranya

a. Rendahnya daya saing SDM Kalimantan Timur

Kemandirian SDM lokal masih menjadi kendala utama pembangunan. SDM Kalimantan Timur belum mampu memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kalimantan Timur karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur adalah tingkat SLTP. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan level perguruan tinggi masih sangat rendah.

Rendahnya daya saing SDM berkorelasi dengan kualitas SDM Kaltim itu sendiri. Artinya pula, upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas SDM pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing itu sendiri. Jika diamati lebih jauh maka diperoleh kesimpulan bahwa rendahnya kualitas SDM berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, dan rendahnya pendapatan per kapita.

b. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih fluktuatif

Laju pertumbuhan ekonomi ini jika dibandingkan dengan pertumbuhan dalam beberapa dekade, tampak mengalami penurunan; setidaknya jika dibandingkan dengan sejak periode tahun 1970. Jika dilihat lebih jauh, struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sumbangan sektor pertanian yang masih rendah mengakibatkan keikutsertaan masyarakat secara luas dalam aktivitas ekonomi juga rendah sehingga menimbulkan senjang pendapatan. Tingginya kesenjangan pendapatan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di



Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih di tingkat sedang. Namun, jika diamati, kesenjangan pendapatan Kalimantan Timur dari tahun ke tahun perlu diwaspadai karena berkecenderungan meningkat.

c. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, konektivitas merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Belum terpenuhinya infrastruktur secara merata ini mengakibatkan tingginya indeks ketimpangan regional Kalimantan Timur yang masih tinggi. Sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai ditandai dengan kumantapan jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan.

Dukungan infrastruktur yang belum memadai juga mengakibatkan lambatnya transformasi ekonomi yang tengah diusung oleh pemerintah daerah, khususnya untuk menopang pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, hilirisasi produk pertanian dan barang primer pada umumnya. Di samping itu, pentingnya perbaikan infrastruktur adalah juga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya penguatan jalur distribusi kebutuhan pokok dan komoditi pemicu inflasi pada umumnya.

d. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang belum sepenuhnya terwujud, beberapa faktor penyebab dapat diidentifikasi



antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang belum berkualitas, dan akuntabilitas kinerja yang masih terus harus ditingkatkan.

c. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Degradasi lingkungan akibat eskalasi pertumbuhan ekonomi migas dan pertambangan menjadi hal yang krusial dikendalikan dalam jangka menengah ke depan. Penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan. Kualitas dan daya dukung lingkungan juga harus diperhatikan untuk ibukota provinsi Kalimantan Timur.

B. Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan hasil capaian analisis penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 hingga tahun 2013, maka permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sekaligus akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 dapat dijabarkan dalam aspek sebagai berikut:

1) Isu-isu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang belum terselesaikan

a) Kontribusi PDRB pertambangan dan penggalian khususnya batubara, makin dominan,

Pertumbuhan PDRB dengan mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan sektor agribisnis (pertanian dalam arti luas), dengan strategi:

- Mengurangi ketimpangan dan ketergantungan pertumbuhan kontribusi sektoral yang cukup besar antara subsektor pertambangan dengan sektor pertanian/agribisnis sebagai tumpuan dari visi Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian dengan melakukan percepatan pembangunan sektor pertanian, melalui strategi penerapan teknologi tepat guna, komoditi unggulan serta mendorong mini industrialisasi di sentra-sentra pertanian yang memberikan daya ungkit tinggi dan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.



- Peningkatan kesadaran dan komitmen dalam program hilisasi sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral, untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan, terutama terkait dengan penurunan PAD, bagi hasil, dan ketenagakerjaan. Peningkatan mata rantai produksi yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dalam bentuk penciptaan output, nilai tambah dan kesempatan kerja lokal, ketersediaan bahan baku pembangkit listrik serta penguasaan teknologi.
- Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan dampak memperkecil ketimpangan antar kecamatan, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, serta penciptaan kesempatan kerja yang luas-luasnya (pertumbuhan inklusif).

Agenda difokuskan 1) Percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan; 2) Pembangunan sarana fasilitas pengolahan tambang batubara; 3) Peningkatan akses para pelaku ekonomi di daerah pedesaan terhadap sumber permodalan (kredit, dan lain-lain); 4) Memperbaiki iklim usaha; 5) Peningkatan akses terhadap perkembangan teknologi; 6) Pengembangan produk unggulan agribisnis; 6) Pendirian industri (UMKM) pengolahan hasil pertanian di sentra pertanian

b) Peningkatan IPM

Meningkatkan pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting untuk memutuskan lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), maka salah satu kebijakan untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas manusia dengan memperkuat sektor kesehatan, khususnya menurunkan angka kematian bayi. Adapun upaya untuk menurunkan angka kematian ibu difokuskan pada: (i) Akses pelayanan kesehatan; (ii) Penguatan sumber daya baik jumlah maupun distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter; (iii) Distribusi prasarana fisik – rumah sakit (iv) Ketersediaan energi bagi prasarana kesehatan.



- c) Peningkatan Usia Harapan Hidup Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka kematian bayi (AKB)

Mengingat AKB/AKI sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, maka upaya peningkatan kesehatan anak harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu. Rendahnya status kesehatan ibu bukan hanya berdampak pada dirinya, namun juga secara langsung terhadap kesehatan janin/bayi. Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan fokus: 1) penyehatan ibu hamil; 2) pemenuhan gizi bayi; 3) penyehatan lingkungan; 4) pelayanan kesehatan bagi perempuan

- d) Perluasan pendidikan menengah (SLTA) dan tinggi yang berkualitas

Peningkatan APM SLTA dengan: 1) memberikan perhatian pada kelompok marjinal untuk lebih mudah mengakses pendidikan lanjut (SLTA) melalui pemberian bantuan dan reformasi sistem penerimaan siswa baru; 2) Perluasan pendidikan menengah atas (termasuk SMK pertanian) dan tinggi berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (*skill formation*) yang lebih terdidik dan relevan dengan visi pembangunan Kutim, terutama dibidang agrobisnis. Peranan pendidikan dalam perekonomian menambah stok modal manusia berupa kapasitas kemampuan penduduk untuk memproduksi barang dan jasa serta produktivitas individu dan penghasilannya.

- e) Peningkatan fasilitas kesenian dan olahraga

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal serta pembinaan dan peningkatan prestasi dan mengolahragakan masyarakat diperlukan adanya peningkatan penyediaan fasilitas kesenian dan olahraga.

2) Isu-isu Aspek Pelayanan Umum

- a) Perluasan akses pendidik usia dini (PAUD)

Upaya perluasan akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan kesiapan anak memasuki sekolah, serta upaya penanggulangan buta huruf dengan mengintegrasikan kegiatan Posyandu dan PAUD yang ada selama ini



serta memberdayakan lembaga pendidikan tradisional yang telah mengukir di masyarakat.

- b) Penyediaan tenaga kesehatan (Jumlah, distribusi dan kualitas), terutama dokter

Tenaga kesehatan berperan penting dalam percepatan pembangunan kesehatan, sehingga diperlukan sistem yang handal yang mengatur manajemen pengumpulan data *performance* SDM, mekanisme pendistribusian maupun peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan (misal: dokter) dan kapasitas jika diperlukan agar memenuhi rasio ideal nakes terhadap penduduk.

Peningkatan Rasio posyandu sebagai UKBM untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, dan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, diawali dengan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita, sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandu kurang atau jumlah balita yang terus meningkat

- c) Penanggulangan penyakit menular (TB) dengan fokus faktor yang mempengaruhi rendahnya CDR pada program TBC : 1) Pengentasan kemiskinan, 2) penyuluhan kesehatan dan 3) perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya serta pemantapan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) pada praktisi kesehatan,

- d) Pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional)

Pelayanan dan jaminan kesehatan dalam skema BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), yang perlu diperhatikan : 1) Sistem pelayanan; 2) manfaat jaminan kesehatan; 3) Pembiayaan dan manajemen keuangan dan 4) Transform BPJS (kepesertaan dari Jamkesmas ke JKN).

- e) Kesenjangan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil

Agar kebutuhan infrastruktur dasar seperti kesehatan serta infrastruktur pendukung lainnya dapat segera dipenuhi diperlukan perhatian lebih dan koordinasi/sinkronisasi/koneksitas yang lebih baik dengan KPDT dan SKPD terkait. Keterbatasan transportasi dan komunikasi antar wilayah telah menyebabkan hambatan akses dan keterlambatan pelayanan kesehatan.

- f) Peningkatan akses air minum dan penanganan sampah

Meningkat akses terhadap air bersih dan air minum yang aman dan akses terhadap sanitasi serta penanganan sampah merupakan elemen lingkungan penting yang menentukan baik buruknya derajat kesehatan masyarakat, maka



perlu akselerasi penyediaan air bersih yang digunakan dan akses minum yang berkualitas serta pengelolaan sampah dipermukiman. Akses air rumah tangga yang baik, minimal menggunakan 20 liter per orang per hari, sedangkan pengelolaan sampah yang baik apabila sampah di rumah tangga diambil petugas sampah, dibuat kompos atau dikubur di dalam tanah.

g) Konservasi dan rehabilitasi hutan

Gejala "stagnasi" pembangunan pertanian (termasuk kehutanan), pada akhir-akhir ini terkait erat dengan berkurangnya perhatian terhadap kerusakan dan kesalahan pengelolaan sumberdaya pertanian, termasuk hutan. Pengelolaan sumberdaya (hutan) secara berkelanjutan, haruslah memperhatikan aspek: 1) kejelasan sistem penguasaan atau sistem kepemilikan untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan dan menghindarkan kemunduran kualitas; 2) pentingnya penggunaan teknologi yang "bersehabat" dengan lingkungan; 3) Pengawasan pemanfaatan dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat; 4) Ambang batas eksploitasi yang tidak boleh dilanggar dan perhatian terhadap aspek eksternalitas (lingkungan alam dan sistem sosial)

h) Kontribusi PDRB pertanian (arti luas)

Reposisi sektor Sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan) sebagai sektor andalan atau "titik berat" pembangunan Kutai Timur dengan pendekatan agribisnis, yaitu

- Restrukturisasi agribisnis sebagai andalan pembangunan pertanian dan pedesaan dimana: a) kegiatan agribisnis harus dipandang sebagai satu jaringan ekonomi utuh sehingga sensitive terhadap dinamika pasar, teknologi dan permodalan; b) pengembangan disesuaikan keunikan lokasi (keunggulan komparatif); c) pengelolaan jaringan agribisnis secara konsolidatif (vertical maupun horizontal) serta d) pengembangan kemitraan.
- Pengembangan sistem insentif berproduksi yang kondusif dan komprehensif (anggaran, perdagangan, peraturan konversi lahan, dan lain-lain)
- Pengembangan pasar finansial yang lebih cocok bagi pembangunan pertanian dan pedesaan.



- Pengembangan infrastruktur fisik (transportasi, pasca panen, dan lain-lain) dan kelembagaan pertanian (perbangkan, saprodi, dan lain-lain) diarahkan sebagai awal dari serangkaian pentahapan pengembangan wilayah yang bertumpu pada kegiatan pertanian dan menghidupkan sistem agribisnis setempat.
- Pengembangan mini industry pengolahan hasil pertanian di sentra pertanian.

i) Produktivitas padi dan pangan utama lokal

Peningkatan produksi padi dan pendapatan petani meskipun relatif cukup sulit seiring dengan menurunnya kualitas lahan pertanian produktif dan lambatnya penambahan kuantitas lahan baru (terutama lahan beririgasi), namun peluang peningkatan produksi masih dapat dicapai dengan: 1) efisiensi usaha tani dengan mengarahkan penekanan biaya produksi atau peningkatan produktivitas melalui a) penerapan teknologi tepat guna, b) pengawalan ketat PPL, c) pengaturan dan pengelolaan saprodi yang efisien serta d) pengaturan dan pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan usaha (kepastian harga dan pasar); dan 2) pengurangan *losses* khususnya pengurangan gangguan hama dan penyakit serta penanganan panen dan pasca panen lebih efisien, sedangkan peluang peningkatan produktivitas jagung dan ubi-ubian masih sangat dimungkinkan dengan introduksi varietas baru, perbaikan varietas dan teknik budidaya (teknologi spesifik lokasi).

j) Ketersediaan pangan utama lokal dan diversifikasi pangan

Akselerasi peningkatan ketersediaan pangan utama lokal dan diversifikasi pangan diperlukan dukungan sinergitas kebijakan dan berbagai regulasi yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan produksi aneka ragam pangan lokal, berkembangnya industri antara (termasuk UKM) dan aneka pangan olahan serta upaya-upaya promotif melalui pendidikan, promosi, sosialisasi dan advokasi. Penganekaragaman konsumsi secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis sumberdaya pangan lokal. Dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam pencapaian sasaran sebagaimana diamanatkan Perpres RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya lokal.

k) Peningkatan pendapatan petani sejalan dengan kemajuan pembangunan Pertanian.



Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani, maka perlu adanya reorientasi, yaitu pergeseran peningkatan produksi menjadi peningkatan pendapatan petani/nelayan, dengan strategi pembangunan pertanian yang berorientasi pada petani/nelayan kecil, yaitu 1) Berbasis pengembangan sumberdaya manusia dengan meningkatkan perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan dan pemukiman dan pelayanan umum yang terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan sektor pertanian, dan 2) Pengaturan dan pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan usaha (menjamin kepastian harga dan pasar). Selain pembinaan kelompok tani, koperasi, juga diperlukan dukungan kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan, pendidikan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

- l) Inventarisasi data capaian fasilitas dan infrastruktur serta kependudukan catatan sipil.

Perlu penyempurnaan sistem manajemen informasi dengan fokus faktor yang mempengaruhi yaitu 1) Teknis, meliputi penetapan indikator baku terstandar, SDM terlatih, instrument pengumpulan data; 2) Organisasi meliputi sumberdaya, struktur sistem, SOP dan budaya organisasi, serta 3) Perilaku yang meliputi motivasi dan tanggung jawab.

- m) Peningkatan Pelayanan dan partisipasi KB

Pelayanan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dalam skema BPJS (JKN), dengan sasaran utama PUS paritas rendah (jumlah anak dua) Penguatan Advokasi dan KE diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat dalam ber-KB serta Penguatan kapasitas tenaga lapangan dan kelembagaan KB.

- n) Peningkatan jumlah investor dan bina UKM

Sesuai *grand design* para pakar ekonomi, idealnya setiap kabupaten/kota memiliki dua persen UMKM dari total jumlah penduduk Kutai Timur (549.429 jiwa) idealnya memiliki 10.980 pelaku UMKM, sedangkan kondisi per 2013 masih 5080. Sehingga terus diperlukan berbagai upaya (penyaluran KUR, pemasaran, dan lain-lain) untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan guna penambahan 5900 UMKM, terutama UMKM yang berbasis agribisnis.

- o) Kepuasan layanan masyarakat



Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*), telah memuaskan kebutuhan dan pilihan masyarakat atau tidak penting untuk dilakukan pengukuran responsivitas masyarakat, salah satunya adalah parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah dengan indeks tingkat kepuasan.

p) Penggalan potensi daerah dan peningkatan kunjungan wisata

Peningkatan kontribusi wisata daerah yang belum tangerap secara optimal dengan memadukan kekayaan alam dan budaya (ekowisata), diantaranya pengembangan desa wisata yang didukung dengan memperkuat usaha homestay, kuliner dan usaha kerajinan tangan.

3) Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing dengan berbasis pengembangan SDM dan iptek yang didukung dengan mengembangkan iklim usaha kondusif, terutama pada sektor agribisnis desa.. Selain reformasi regulasi, juga diperlukan koneksitas dukungan infrastruktur fisik maupun lunak serta keterjaminan ketersediaan energi (listrik).

Terdapat 3 hal penting; 1) dalam mencapai pertumbuhan maksimal harus tersedia sarana prasarana yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan (*connecting growth pole*); 2) koneksitas antar daerah berupa sarana transportasi dan jaringan sistem logistik yang efisien serta 3) koneksitas antar daerah terpencil (*remote area*). Keterbatasan transportasi menyebabkan keonggahan industri (termasuk agroindustri) menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Beberapa faktor yang perlu lebih diperhatikan dan diupayakan dalam pengembangan SDM dan iptek, diantaranya: dengan upaya peningkatan status gizi, derajat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas.

Beberapa faktor yang perlu lebih diupayakan dalam membantu mengembangkan iklim usaha, diantaranya: 1) kejelasan dan kepastian kebijakan dan sinkronisasi regulasi/peraturan pusat dan daerah, termasuk RTRW; 2) kelembagaan pelayanan investasi; 3) ketenagakerjaan; 4) keamanan; 5) korupsi.



Berikut Sinkronisasi prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015:

Tabel 2. 113
Sinkronisasi Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan
RPJMD Kabupaten . Kutai Timur

No	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018	RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015
(1)	(2)	(3)
1	Prioritas bidang pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2	Prioritas bidang kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3	Prioritas bidang ekonomi	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
		Peningkatan pembangunan perdesaan
		Pengelolaan kawasan perbatasan(hinterland)
4	Prioritas bidang pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
		Peningkatan pembangunan perdesaan
		Pengelolaan kawasan perbatasan(hinterland)
5	Prioritas bidang penurunan pengangguran	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
6	Prioritas bidang pertanian	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
7	Prioritas bidang infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
		Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
		Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman
		Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
8	Prioritas bidang reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)

Keterkaitan prioritas pembangunan RKPD 2015 Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:



- 1) **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, yaitu dengan pengembangan wajar 12 tahun, pendidikan keterampilan/kejuruan, dan hal ini selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu prioritas bidang pendidikan.
- 2) **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan jamkesmas. Prioritas tersebut selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu prioritas bidang kesehatan.
- 3) **Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran** dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu penanganan kemiskinan, dan penurunan pengangguran.
- 4) **Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah melalui pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih dan persampahan, serta transportasi yang selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu prioritas bidang infrastruktur.
- 5) **Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat** dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Berbagai jenis produk unggulan pertanian (dalam arti luas) yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dan sektor-sektor yang memmanifestkan potensi lokal (*comparative advantage*) melalui peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam, modal, informasi dan pasar) dan peningkatan skala ekonomi produk unggulan, yang juga selaras dengan prioritas RPJMD Kalimantan Timur yaitu bidang ekonomi.
- 6) **Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan dan lingkungan hidup** dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang



telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya melalui rehabilitasi kerusakan lingkungan, yang juga selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu bidang infrastruktur.

- 7) **Pemantapan Pengelolaan kawasan perdesaan**, dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah desa dengan wilayah perkotaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu bidang infrastruktur.
- 8) **Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan**, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu bidang pertanian.
- 9) **Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi** dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi informasi dan komunikasi masyarakat dan sistem pelayanan publik. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu bidang infrastruktur.
- 10) **Peningkatan Kapasitas Pemerintahan (*capacity building*)**, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man on the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ini selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi yaitu prioritas bidang reformasi birokrasi.



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah

Tabel 2.114
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Didang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai [<] Sesuai [=] Melampaui [>]	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pamerataan Ekonomi				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Melampaui	Masih adanya ketimpangan kontribusi sektor pertambangan dan pertanian	
1.2.	PDRB per kapita	Melampaui		
1.3.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Melampaui		
1.4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Melampaui		
1.5.	IPM	Belum tercapai	Masih rendahnya UHH	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	Melampaui	Belum optimanya partisipasi masyarakat yang mampu berperan ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Belum tercapai		
1.3.1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Melampaui		
1.3.2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Melampaui		
1.3.3.	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui	Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	
1.4.	Angka pendidikan yang diemaskan	Melampaui		
1.5.	Angka Partisipasi Murni			
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Melampaui		
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Melampaui	Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan	
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui		
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	Melampaui	Distribusi tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) belum merata hingga desa-desa	
2.2.	Angka usia harapan hidup	Belum Tercapai		
3.	Hutan-hutan			
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	-		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Pencetus Kebhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Ketenagakerjaan			
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja		Masih relatif rendahnya daya saing produk lokal ditunjukkan dengan angka penduduk angkatan kerja yang berpendidikan SMA Meski besarnya per permintaan tenaga kerja dengan lulusan yang ada terutama jenjang SMA Meski tingginya angka penduduk eseng di pengangguran	
Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
1.	Kebudayaan			
1.1.	Jumlah grup kesenian	-	Tergesernya budaya lokal dengan budaya modern akibat globalisasi	
1.2.	Jumlah gedung	Gesuai		
2.	Pemuda dan Olahraga			
2.1.	Jumlah klub olahraga	Sesuai	Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki organisasi olahraga	
2.2.	Jumlah gedung olahraga	Gesuai		
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Fokus Layanan Urusan Wajib				
1.	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan dasar			
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui		
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/pendidikan dasar	Melampaui		
1.1.3.	Rasio guru/murid			
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Melampaui		
1.2.	Pendidikan menengah			
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui		
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Melampaui		
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	Melampaui		
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Melampaui		
1.2.5.	Pendidik yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak bisa aksara)	Melampaui		
1.3.	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		Terkendahnya partisipasi orang tua dalam proses penyelesaian lahan	
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik		Lemahnya koordinasi antara Dinas dan sektor terkait (PU	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PLTR)	
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Belum tercapai		
1.5.	Angka Putus Sekolah			
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Sesuai	Rintang kendala tinggi karena kondisi geografis wilayah	
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Melampaui		
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Melampaui		
1.6.	Angka Kelulusan			
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Melampaui	Masih kurangnya jumlah sekolah yang memenuhi standar (akreditasi) Belum adanya SOP aspek pelayanan pendidikan	
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Melampaui		
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Melampaui		
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Melampaui		
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Belum tercapai		
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/PAV	Melampaui	Masih belum memadai jumlah guru berdasarkan kualifikasi tingkat studi	
2.	Kesehatan			
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	Belum tercapai	Masih belum memadai ketersediaan tenaga medis, para medis, dan fasilitas kesehatan	
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pusat pelayanan penduduk	-		
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Sesuai		
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Sesuai		
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Melampaui	Belum meratanya sebaran tenaga para medis terutama di wilayah pedesaan	
2.6.	Cakupan kompetensi kebidanan yang ditangani	Belum tercapai		
2.7.	Cakupan penanganan persalinan dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Melampaui		
2.8.	Cakupan Dasar/keluahan Universal Child Immunization (UCI)	Melampaui		
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Sesuai	Masih belum memadai dan optimalnya peran puskesmas serta belum adanya biaya operasional ke LPT	
2.10.	Cakupan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBG RIA	Belum Tercapai		
2.11.	Cakupan penanganan dan	Sesuai		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penanganan penderita penyakit TBC			
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Belum tercapai	Masih kurangnya sosialisasi dan promosi bagi kesehatan masyarakat.	
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	Belum tercapai	Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	
2.14.	Cakupan puskesmas	Melampaui		
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	Melampaui		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proponal penjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	Masih rendahnya kualitas jaringan jalan dan jembatan terutama pada jalur utama	
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	Melampaui	Masih belum memadainya jaringan dan bangunan pelengkap	
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Belum tercapai	Masih adanya kesenjangan antara beban kerja dengan kapasitas organisasi	
3.4.	Persentase rumah tinggal sanitasi	-	Masih adanya kesenjangan antara ketersediaan BUM operator dengan volume/ beban kerja/ kegiatan	
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung beserta fasilitasnya untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan	
3.6.	Rasio tempat pemakaman sampah (TPS) per satuan penduduk	-		
3.7.	Rasio rumah layak huni	Melampaui		
3.8.	Rasio permukiman layak huni	Melampaui		
3.9.	Perpanjang jalan Rata 4	-		
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal kelas road 4)	-	Masih belum terhubungnya seluruh akses antar desa dan antar kecamatan	
3.11.	Perpanjang jalan yang memiliki volume dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Sesuai	Belum optimalnya pembangunan sistem jaringan irigasi drainase secara kawasan dan kualitas	
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah ter	Belum tercapai	Masih adanya kesenjangan kerja dengan kapasitas organisasi	
3.14.	Pembangunan tempat di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan banjir meliputi kawasan kota	-		
3.15.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	-		
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	-	Masih terbatas fasilitas dan belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih	
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	-	Masih terbatasnya kelistrikan	
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	-	Masih kurangnya jaringan	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sewa yang memenuhi syarat kesehatan Belum adanya pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu	
4.4.	Rumah layak huni	Melampaui	Belum tersedianya data base perumahan	
5.	Perencanaan Ruang			
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Capaian Luas Wilayah ber- IPL/HGB	-	Masih terjadinya konflik pemanfaatan lahan, konversi lahan serta kepastian peruntukan	
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Melampaui	Kurangnya sosialisasi tentang syarat kondisi bangunan dan peruntukan kawasan	
5.3.	Tingkat polik yang berhasil diuruskannya	-	Masih belum optimalnya pengendalian lahan dan tata ruang serta pemertan URTBL	
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Belum memadainya SDM apendik dalam bidang perencanaan pembangunan	
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Masih terbatasnya dokumen perencanaan	
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada		
6.4.	Penjajaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Masih kurang optimalnya peran SKPD terkait perencanaan pembangunan Masih belum diupayakan pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai pedoman	
7.	Perhubungan			
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Melampaui	Masih terbatasnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara	
7.2.	Rasio uji trayek	-	Masih terbatasnya akses perijinan untuk pengelolaan trayek	
7.3.	Jumlah uji ktr angkutan umum	-	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan kendaraan bermotor	
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Sesuai		
7.5.	Angkutan darat	-		
7.6.	Kapabilitas KIR angkutan umum			
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIF)	Melampaui	Masih kurangnya GDM pengujian kendaraan bermotor	
7.8.	Pemancangan Rambu-rambu	-	Masih terbatasnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	
8.	Lingkungan Hidup			



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
8.1	Penerjemah penanganan sampah	-	Masih belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah kurangnya sosialisasi pada masyarakat dalam pengumpulan sampah	
8.2	Persentase Penduduk berakses air minum	+	Masih rendahnya kualitas air baku	
8.3	Persentase luas pemukiman yang tertata	-	Belum optimalnya upaya penyediaan lingkungan dan pemukiman	
8.4	Pencemaran status mutu air			
8.5	Laporan penghapusan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	-		
8.6	Dekupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Belum tercapai	Masih rendahnya kepatuhan terhadap implementasi AMDAL	
8.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per 500 penduduk		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah	
8.8	Penegakan hukum lingkungan	Sesuai	Belum adanya regulasi penetapan kawasan konservasi	
9.	Pertanahan			
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	-	Masih adanya konflik kepemilikan dan lahan yang tak bersertifikat	
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	-		
9.3	Penyelesaian sengketa lokal			
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
10.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	Tingginya angka migrasi di ibukota kabupaten dan daerah produktif	
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	-	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan	
10.3	Rasio pasangan berakte nikah	Belum tercapai		
10.4	Kepemilikan KTP	Belum tercapai	Belum optimalnya registrasi kependudukan di tingkat desa	
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Belum tercapai		
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Sesuai	Adanya keterbatasan SDM dalam bidang IT kependudukan	
10.7	Penetapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum tercapai		
11.	Pembudayaan Pemampuan dan Perlindungan Anak			
11.1	Persentase partisipasi pemampuan di lembaga pemerintah	Melampaui		
11.2	Partisipasi pemampuan di lembaga swasta	Melampaui	Masih belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder	
11.3	Rasio KURTI	-	Masih belum optimalnya penanganan KURTI dan	